Kepemimpinan Perempuan Di Balik Bayang – Bayang Patriarki (Studi Kasus Terhadap Peran Perempuan Dalam ranah Politik Lokal)

Essa Fatima Zahra

Ilmu Pemerintahan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
essafahra@gmail.com

E-ISSN (2721-0642)

Received:
March 26 2020

Revised:
April 11 2020

Accepted:
April 16 2020

Doi Number
10.37950/ijd.v2i1.32

Abstract

Today, a woman becomes a leader is not impossible. With the growing understanding of feminism and popular has awakened women - women to be leaders like men. However, the government of women in politics still can not be separated from the patriarchal system because of the culture of a binding political dynasty. As in Banten itself, some regions have indeed emerged female leaders but the tactala became a pawn in maintaining the continuity of the established political dynasty and the leader of this woman finally lost her feminism and political freedom because of the local power that governs this woman and the night does not appear in this woman's role. But one of the female leaders in Banten is no different from other female leaders. Airin as the mayor of South Tangerang is quite affordable on the other hand and applied from the applied policy. Although, he himself is still in the field of political dynasty and hidden in Banten political patriarchal system.

Keywords: *feminism, female leadership, local strongman*

Abstrak

Saat ini, seorang perempuan menjadi seorang pemimpin bukanlah hal yang tidak mungkin. Dengan paham feminisme yang semakin berkembang dan populer telah menyadarkan perempuan-perempuan untuk dapat menjadi pemimpin seperti laki -

laki. Namun, kenyataannya kepemimpinan perempuan dalam politik masih tidak lepas dari system patriarki karena budaya dinasti politik yang mengikat. Seperti di Banten sendiri, beberapa daerah memang sudah muncul pemimpin – pemimpin perempuan tapi taklala hanyalah menjadi sebuah pion dalam menjaga kelanggengan dinasti politik yang terbangun dan pemimpin perempuan ini akhirnya kehilangan sisi feminisme dan kewenangan politiknya akibat adanya local strongman yang mengatur pemimpin perempuan ini dan akhirnya tidak muncul kemajuan dalam kepemimpinan perempuan ini. Namun salah satu pemimpin perempuan di banten sepertinya sedikit berbeda dibanding pemimpin perempuan lainnya. Airin sebagai walikota Tangerang Selatan cukup demokratis dalam sisi kebijakan dan menunjukkan arti kepemimpinan perempuan dari kebijakan yang diterapkan. Walaupun, ia sendiri masih dalam lingkup dinasti politik dan terjebak dalam sistem patriarki politik Banten.

Kata kunci: feminisme, kepemimpinan perempuan, *local strongman*.

Pendahuluan

Kajian ini menggunakan analisis gender dan politik. Di mana kritik terhadap kecenderungan analisis dan metode penelitian politik yang tidak netral gender, dibangun dengan asumsi dasar yang mengabaikan pengalaman perempuan sebagai subyek telah muncul sejak 1970an. Kathleen B. Jones (1998 : 11-12) menyatakan bahwa salah satu sebab terpenting perempuan dan kepentingan perempuan tidak nampak dalam pemikiran dan analisis ilmu politik tradisional di dunia barat adalah penerimaan konsep keterpisahan secara fundamental antara public sebagai domain laki – laki dan melakukan “political action” dalam sebuah kebijakan, dengan ruang privat yang diasosiasikan dengan peran perempuan di ranah local. Feminisme juga mencatat kecenderungan pengabaian pengalaman perempuan dalam analisis politik disebabkan oleh struktur produksi pengetahuan dan referensi dalam studi politik seperti dikemukakan Sandar harding , Ann Oakley , Mies ,dan Vicky randall.

Berbeda dengan konteks analisis politik gender di negara – negara barat, dalam asia tenggara berbeda. Kecenderungan tidak adanya analisis gender dalam karya – karya ilmu politik juga terjadi di asia tenggara. Kritik mengenai politik di asia tenggara yang tengah menganalisis gender dalam studi politik, telah muncul sejak 1990an. Shelly Errington (1990) memberikan catatan bahwa tidak adanya analisis gender dalam kajian – kajian politik di Asia tenggara bisa jadi disebabkan oleh fakta social berupa kondisi ekonomi yang relative sejajar antara perempuan dan laki – laki di Asia tenggara.

Munculnya pemimpin – pemimpin perempuan di banten ,tak berdiri sendiri begitu saja. Dorongan Bosisme , Local Strong Man dan Oligarki yang sangat kuat yang menjadi background pemimpin dari perempuan – perempuan di Banten. Hal ini menjadikan perempuan politik di banten ini maju bukan karena atas kesadaran diri akan kesetaraan gender dan meleak politiknya, namun adanya dorongan oligarki yang tak dapat lepas dari struktur politik di banten. Perempuan yang dipilih oleh keluarga mereka sebagai pemimpin, akan mudah diatur oleh keluarga mereka untuk melanggengkan oligarki nya. Karena oligarki, mereka berpikir bahwa perempuan lebih

mudah diatur dan akhirnya perempuan ini menjadi alat untuk mempertahankan kekuasaan.

Perkembangan kontribusi perempuan dalam ranah politik, Nyimas Gamparan bisa dikatakan salah seorang pelopor emansipasi perempuan merupakan salah satu gelombang pertama pergerakan perempuan di Indonesia. Nyimas Gamparan dikenal dalam perang Cikande. Perang tersebut terjadi sekitar tahun 1829 hingga 1830. Perang tersebut terjadi lantaran Nyimas Gamparan yang memimpin puluhan pendekar wanita menolak Cultuurstelsel (1830) yang diterapkan Belanda kepada penduduk pribumi. Nyimas Gamparan dan puluhan prajurit wanitanya menggunakan taktik perang gerilya untuk menghadapi pasukan Belanda. Pasukan Nyimas Gamparan ini memiliki markas persembunyian di wilayah yang kini disebut Balaraja. Nyimas Gamparan dan puluhan prajurit wanitanya menggunakan taktik perang gerilya untuk menghadapi pasukan Belanda dan akhirnya berhasil memukul mundur pasukan Belanda. Dalam hal ini telah terlihat bahwa keterlibatan perempuan dalam politik pun sudah ada pada tahun 1800an.

Banten tidak pernah lepas dengan kentalnya agama Islam dan seribu pondok pesantren nya. Tentu hal agama pun sangat melekat dengan masyarakatnya dan juga memahami agama dalam berbagai aspek kehidupan di masyarakat terutama dalam kehidupan politik Islam, yang berpendapat bahwa laki-laki lah yang lebih baik menjadi pemimpin. Hal ini sangat jelas sekali bila dikaitkan dalam gender, tentu laki-laki lebih memiliki kekuasaan dibanding perempuan yang mustahil dalam menjabat posisi sebagai pemimpin.

Namun, pada kenyataannya beberapa daerah di Banten memiliki pemimpin perempuan. Ada Ratu Atut Chosiyah yang pernah memimpin sebagai gubernur Banten yang kemudian terdug kasus korupsi, ada Iti Jayabaya sebagai bupati Lebak, ada Airin Rachmi Diany sebagai walikota Tangerang Selatan yang menjabat selama periode dan Hj Irna Nuralita sebagai Bupati Pandeglang. Terlintas budaya patriarki pada agama dipatahkan dengan munculnya pemimpin-pemimpin perempuan di beberapa daerah Banten. Hal itu tentu saja aneh dalam sebuah daerah yang mayoritas masyarakatnya berpegang teguh pada agama Islam dan juga terlihat bahwa pergeseran dalam pandangan sosok pemimpin, Banten selangkah lebih maju dalam sadarnya gender perempuan dalam mendapatkan haknya.

Di daerah Tangerang Selatan, walikota perempuan yaitu Airin Rachmi Diany yang justru menjadi pembeda dalam pemimpin-pemimpin perempuan di Banten. Di mana ada beberapa kebijakan yang dia buat dan mencitrakan diri perempuan nya melalui kebijakan yang ia buat dibanding dengan pemimpin-pemimpin daerah di Banten yang justru tidak menceritakan sisi perempuannya sebagai pemimpin perempuan. Salah satu kebijakan dari Airin di tahun 2013 yang menjadi latar belakang penelitian ini yaitu layanan berobat gratis diberikan kepada penduduk Kota Tangsel tanpa dipungut biaya atau gratis yang ketentuannya dengan menunjukkan e-ktip dan rujukan puskesmas di wilayah Tangsel yang sudah diverifikasi oleh pemerintah. Hal ini menjadi sumbangsih terhadap masyarakat Tangsel dalam kepemimpinan perempuannya walaupun dilatarbelakangi dengan oligarki.

Kerangka Teori

Feminisme

Feminisme berasal dari bahasa latin “femina”, yang artinya memiliki sifat keperempuanan. Selain itu. Feminisme dapat diartikan tentang gerakan yang menuntut persamaan sebuah hak yang sepenuhnya antara kaum wanita dan pria. Menurut June Hannam (2007:22) di dalam buku *Feminism*, kata feminisme bisa diartikan sebagai: *A recognition of an imbalance of power between the sexes, with woman in a subordinate role to men* ; Pengakuan tentang ketidakseimbangan kekuatan antaradua jenis kelamin, dengan peranan wanita berada dibawah pria.

Teori feminisme memfokuskan diri pada pentingnya kesadaran mengenai persamaan hak antara perempuan dan laki-laki dalam semua bidang. Teori ini berkembang sebagai reaksi atas fakta yang terjadi di masyarakat, yaitu adanya konflik kelas, ras, dan terutama adanya konflik gender. Feminisme mencoba untuk menghilangkan pertentangan antara kelompok yang lemah yang dianggap lebih kuat.

Lebih jauh lagi, feminisme menolak ketidakadilan sebagai akibat masyarakat patriarki, menolak sejarah dan filsafat sebagai disiplin yang berpusat pada laki-laki (Ratna, 2007:186).

Teori feminisme akan mempermudah peneliti untuk mengkaji peran perempuan dalam kancah politik, juga perilaku patriark yang sering terjadi ditengah peran mereka. Praktik diskriminasi gender merupakan sebuah hal yang sering terjadi didalam ruang lingkup kerja. Salah satunya status Airin Rachmi Diany sebagai Walikota Tangerang Selatan. Terkesan sedikit pemimpin perempuan di Indonesia. Mayoritas perempuan yang berprofesi sebagai administrasi publik beranggapan jika memimpin tataran paling atas merupakan hal yang tidak mungkin, karena tendensi perilaku maskulin akan menjadi antitesa untuk mereka.

Figure 1. Peta Relasi

Local Strongman

Khairul Iman (2015) menuliskan bahwa *Local Strongmen* adalah tokoh yang identik dengan kelebihan-kelebihan yang mereka miliki serta memiliki keahlian dibidangnya, local strongmen merupakan sebuah terminologi yang identik dengan elit, meskipun terdapat banyak pengertian tentang konsep elit namun pada dasarnya ada kesamaan pemahaman bahwa konsep elit merujuk pada sekumpulan orang sebagai individu-individu yang superior yang berbeda dengan massa yang menguasai

jaringan-jaringan kekuasaan atau kelompok yang berada dilingkar kekuasaan maupun sedang berkuasa (Hikmawan, 2020).

Begitupun dengan local strongmen. Keunggulan elite atas massa sepenuhnya tergantung pada keberhasilan mereka dalam memanipulasi lingkungannya dengan simbol-simbol, kebaikan-kebaikan atau tindakan-tindakan. (Nurhasim, 2003:13)

Banten adalah salah satu provinsi baru di Indonesia, pada 4 Oktober 2004 DPR-RI menetapkan UU Pembentukan Provinsi Banten UU No. 23/2000. Dinamika politik yang terjadi di provinsi Banten dikarenakan factor informal the strong man yang terlalu jauh mengintervensi kebijakan pemerintah daerah, yang sangat berkepentingan mendapat akses terhadap sumber daya (resources) untuk menggaling kekuatan politik bagi salah satu calon kandidat. (Nordholt, Schulte, Klinken, 2014:283).

Bicara perkara skema politik Banten, Tubagus Chasan Sohib yang juga dijuluki "Jawara Banten" ini namanya sering disebut sebagai mastermind dari fenomena politik dinasti di Banten. Ia memiliki peran penting atas naiknya para politisi yang berbasis keluarga (tirani) menuju tataran atas. Seperti naiknya Ratu Atut Chosiyah pada tahun 2005 yang juga mendorong pencalonan Airin sebagai calon Wakil Bupati Tangerang pada tahun 2008 namun gagal. Keberhasilan dicapai Airin saat mendapat dorongan keluarga Tubagus Chasan Sohib, terutama Ratu Atut Chosiyah sebagai kakak iparnya dan Tubagus Chaeri Wardana sebagai suaminya untuk mencalonkan diri sebagai Walikota Tangerang Selatan.

Patriarki Dalam Kancan Politik

Budaya patriarki menempatkan perempuan pada peran-peran domestik seperti peran pengasuhan, pendidik, dan penjaga moral. Sementara itu, peran laki-laki sebagai kepala rumah tangga, pengambil keputusan, dan pencari nafkah. Perpanjangan dari berbagai peran yang dilekatkan pada perempuan tersebut (Hikmawan, 2017), maka arena politik yang sarat dengan peran pengambil kebijakan terkait erat dengan isu-isu kekuasaan identik dengan dunia laki-laki. Apabila perempuan masuk ke panggung politik kerap dianggap sesuatu yang kurang lazim atau tidak pantas bahkan arena politik dianggap dunia yang keras, sarat dengan pesaing bahkan terkesan sangat ambisius. (Sihite, 159:2007)

Secara sosiologis latar belakang inilah pertarungan antara laki-laki dan perempuan dalam ruang politik menjadi menarik karena hegemoni kelaki-lakiaan atau maskulinitas dalam ruang ini didobrak Airin. Timbul sebuah "ego" atas nama kelaki-lakiaan yang dimainkan oleh lawan-lawan politik Airin berupa menyerang urusan pribadi yang dihadapi Airin. Targetnya tentu saja untuk menyerang psikologis Airin.

Akan tetapi, hal ini dapat dinilai bukan sebuah pengaruh besar dalam jalannya manifestasi Airin dalam menjalankan kepemimpinannya. Salah satu dari bentuk manifestasinya adalah ketika diundangnya Walikota Tangerang Selatan, Hj Airin Rachmi Diany, SH, MH sebagai pembicara dalam Event Commission on Status of Women (CSW) ke-61 di Kota New York, Amerika Serikat, yang berlangsung dari tanggal 13 sampai dengan 24 Maret 2017.

Airin sempat menuturkan bahwa "Salah satu poin penting yang banyak mendapatkan perhatian adalah terkait dengan bagaimana Pemerintah Kota Tangerang Selatan berhasil dalam meningkatkan kematangan usia perkawinan, dalam hal ini Pemerintah Kota Tangerang Selatan berhasil dalam Rekor MURli. Dengan adanya event ini, manfaat terasa langsung dirasakan oleh orang nomor satu se-Kota Tangsel

ini.” KumparanNEWS (2017.Maret.19). Saat Wali Kota Tangsel Airin Bicara soal Perempuan di Hadapan Dunia.

Peran Politik Perempuan

Kesadaran politik perempuan telah tumbuh di Indonesia sejak Kongres Perempuan di Yogyakarta tahun 1928. Dorongan atas kesadaran politik dalam bentuk penggunaan hak politik juga terjadi saat pemilu 1955, baik itu untuk memilih maupun dipilih. Pengakuan yang sama terjadi di mana perempuan dengan laki-laki memiliki kesamaan hak berbangsa dan bernegara.

Disamping itu, Pasca reformasi tahun 1998, gerakan politik perempuan mulai bangkit lagi, terutama untuk melakukan penyadaran perempuan untuk kembali berpartisipasi dalam politik (Hikmawan, 2020). Beberapa agenda yang diusung misalnya dengan mendorong partai peserta pemilu untuk lebih memperhatikan kepentingan perempuan serta mendorong keterlibatan perempuan lebih banyak dalam partai politik dan lembaga legislatif. Hal tersebut telah ditetapkan pada ketentuan hukum secara tegas dan gamblang. Semua tertera pada UU No. 39/1999 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi :

“Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.”

Pasal 3 ayat (3) yang berbunyi :

“Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.”

Kedua pasal tersebut menjelaskan bahwa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin telah dilarang oleh hukum. Aturan hukum lainnya harus meniadakan diskriminasi dalam setiap aspek kehidupan, sosial, politik, ekonomi, budaya dan hukum. Pasal ini juga mewakili perspektif bahwa pemilu, kepartaian, pemilihan anggota legislatif dan yudikatif harus menjadikan keterwakilan perempuan sesuai dengan prasyarat yang ditentukan.

Metode Penelitian

Metode kajian ini merupakan penelitian Deskriptif dengan menggunakan Kualitatif (Creswell, 2013) yang terdiri dari wawancara narasumber, observasi di masyarakat, pengumpulan beberapa dokumen pendukung serta daftar pustaka atau literatur yang terkait dalam penelitian ini.

Penelitian ini, penulis fokus terhadap masalah sosok perempuan dalam kepemimpinannya dan menjawab permasalahan dengan analisis deskriptif analisis dari data – data kualitatif (Creswell, 2009). Dalam pencarian data, peneliti melakukan wawancara kepada beberapa warga kota tangerang selatan mengenai kebijakan ibu Airin dalam kebijakan kesehatan yang ia terapkan yakni kebijakan pengguna e-ktip

dalam administrasi kesehatan di puskesmas di kota tanggerang untuk mendapatkan layanan kesehatan gratis untuk warga kota tanggerang selatan.

Alasan dalam memilih metode penelitian yakni untuk memastikan langsung kepada masyarakat kota tanggerang selatan sebagai masyarakat yang merasakan langsung dari kepemimpinan ibu Airin sebagai walikota tanggerang selatan dan literature yang mendukung mengenai kepemimpinan perempuan yang saat ini telah dilakukan ibu Airin.

Hasil dan Diskusi

Posisi Perempuan dalam Konstruksi Sosial Masyarakat Banten.

Masyarakat Banten sangat terkenal dengan budaya Islam yang sangat kental, bahkan Banten sendiri disebut sebagai provinsi seribu pesantren karena banyaknya pesantren yang berdiri disini walaupun tidak seluruhnya masyarakat Banten adalah pemeluk agama islam. Islam tidak hanya berfungsi sebagai referensi kelakuan sosial dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi, Islam juga merupakan salah satu unsur penanda identitas etnik di provinsi Banten. Kedua unsur tersebut saling menentukan dan keanggotaan seseorang dalam kelompok kultur di Provinsi Banten sangat ditentukan oleh kepemilikan identitas Islam pada orang tersebut. Karenanya dapat dikatakan bahwa budaya yang berkembang di Banten merupakan representasi nilai – nilai Islam.

Dalam agama islam, jelas bahwa sosok perempuan bukanlah seorang pemimpin yang ideal. Berpikir bahwa laki – laki lebih baik dibanding perempuan untuk menjadi seorang pemimpin. Namun nyata nya hal tersebut dipatahkan dengan munculnya pemimpin – pemimpin di Banten beberapa tahun terakhir ini dan Banten merupakan provinsi dengan pemimpin perempuan terbanyak di Indonesia. Salah satu kepemimpinan perempuan di Banten adalah Ibu Airin Rachmi Diany yang mulai menjabat sebagai walikota tangerang selatan pada tahun 2011 dan kembali lagi menjabat di posisi yang sama dalam dua periode hingga saat ini.

Munculnya kepemimpinan perempuan yakni ibu Airin Rachmi Diany jelas mencutrakan diri sebagai bentuk dari feminsime, yakni perempuan dapat menjadi pemimpin, apalagi memimpin kota sebesar Tangerang Selatan yang berdekatan dengan ibukota DKI Jakarta, tentu hal ini pun bukan hal yang tidak biasa dan secara politik ataupun ekonomi memiliki posisi yang sangat kuat.

Figure 2
Local strongman dalam munculnya kepemimpinan Airin.

Seorang Airin muncul menjadi pemimpin di Kota Tangerang Selatan menjadi tanda tanya besar, bahwa yang kita tahu airin bukanlah berasal dari Banten, terlebih lagi bukan berasal dari keluarga dinasti Banten. Namun keberhasilan airin menjabat sebagai walikota Tangerang Selatan selama dua periode di tanah yang terkenal dinastinya, bukan semata – mata perjuangan independen seorang airin yang berhasil menembus banteng dinasti yang sangat besar dan kuat di Banten. Melihat silsilah kekeluargaan airin, ternyata airin merupakan istri dari Tb. Chaerul Wardana yang merupakan adik dari Ratu Atut dan anak dari Tb. Chasan yang merupakan *local strongman* di Banten, tentu hal ini secara tidak langsung adanya campur tangan kekerabatan politik dalam kemenangan airin di dalam lingkaran dinasti Banten.

Dalam kasus airin, ternyata tidak hanya airin yang melakukan hal serupa untuk menjadi pemimpin perempuan di salah satu daerah di Banten, namun keseluruhan pemimpin perempuan di daerah Banten juga memperoleh kemenangan karena masih dalam satu lingkaran keluarga dinasti Banten. Semua pemerintahan di Banten ternyata berpusat oleh satu “komando” atau bisa disebut sebagai *Shadow Of Government*, ialah pemegang dinasti Banten dan pemerintahan di Banten yakni TB Chasan. Alasan yang membuat mengapa perempuan – perempuan ini di pilih sebagai pemimpin – pemimpin baru yang mewarnai Banten, dan alasan ini di perkuat dengan dalih untuk tetap menjaga kekuasaan dinasti Banten agar tidak jatuh ke tangan di luar dinasti Banten, maka laki – laki atau pun perempuan sepertinya tak berlaku lagi di dalam politik dinasti Banten ini.

Majunya perempuan – perempuan dari dinasti Banten ini pun, menaikkan esktitensi paham feminisme yang dimana di citrakan bahwa Banten selangkah lebih maju di banding daerah lain dalam keterlibatan perempuan dalam dunia politik (Hikmawan, 2020). Namun, lagi – lagi perempuan – perempuan ini ternyata hanya menjadi sebuah “Pion” Politik dan tetap saja diatur oleh *Shadow Of Government*. alih – alih sudah berharap patriarki ini berhenti di jalur kemenangan politik, tapi tetap saja ada system patriarki dalam menjalankan pemerintahan itu sendiri setelah kemenangan di dapatkan. Perempuan menjadi alat politik dalam melanggengkan kekuasaan dan dengan latar belakang pemikiran bahwa perempuan lebih mudah “diatur” dalam melanggengkan kekuasaan dinasti Politik ini.

Politik Perempuan Ala Airin.

dalam dunia politik Banten yang tidak terlepas dengan dinasti nya, namun ada perbedaan yang dilakukan oleh airin dibanding dengan pemimpin perempuan di daerah Banten lainnya. Walaupun secara jelas Airin masuk dalam lingkaran dinasti Banten, namun ia masih bias bersikap demokratis seakan dia tak terlihat seperti pemimpin dinasti lainnya. Dapat diakui sisi feminisme dalam peran politik Airin di kota Tangerang Selatan terlihat dari bagaimana ia membuat sebuah kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat dan bentuk feminisme juga focus mengenai *Human Rights* yang berbasis di isu krusial seperti kesehatan ataupun pendidikan, dan Airin menunjukkan hal tersebut.

Salah satu bentuk kebijakan yang dibuat oleh airin dalam menunjukkan sisi feminisme nya dan sangat dirasakan oleh masyarakat kota Tangerang Selatan yang merupakan warga perkotaan dan cukup besar karena sangat berdekatan dengan

ibukota DKI Jakarta. Kebijakan ini sangat membantu warga kota Tangerang selatan yakni mengenai kebijakan berobat gratis menggunakan E-KTP khusus Kota Tangerang Selatan di setiap puskesmas yang tersedia di Kota Tangerang Selatan. Kebijakan ini hampir serupa dengan kebijakan di DKI Jakarta mengenai kartu layanan kesehatan gratis seperti Kartu Jakarta Sehat (KJS). Rupanya Airin pun berusaha mengimplementasikan kebijakan serupa di Kota Tangerang Selatan dan kebijakan yang ia buat membuahkan hasil dan masyarakat kota Tangerang Selatan memberikan respon positif terhadap kebijakan tersebut. Kebijakan tersebut mulai berlaku saat ia menjabat di periode pertama dan hingga saat ini pun masih berlangsung dan hal itu pun menjadi strategi dari Airin yang hingga saat ini pun dia dapat menjabat dua periode menjadi Walikota Tangerang Selatan.

Pada akhirnya, cengkaman system patriarki tak dapat dihilangkan bahkan dihindari oleh para pemimpin perempuan walaupun mereka memiliki kewenangan serta kekuasaan. Apalagi patriarki memiliki konotasi negatif dalam dunia feminisme dan dinasti Politik juga memiliki konotasi negatif dalam dunia politik, namun bagaimana menyikapi dinasti politik yang secara otomatis system patriarki termasuk di dalamnya. Walaupun di dalam lingkaran patriarki, namun bagaimana pemimpin perempuan ini tetap berpihak pada masyarakat yang merupakan tugas utama nya dalam mensejahterakan masyarakat. Bagaimana tetap bersikap demokratis untuk masyarakatnya walaupun masuk dalam lingkaran dinasti politik bukanlah penghambat untuk menjadi kan kepemimpinan perempuan saat ini hanyalah sebuah simbolik feminisme semata (Hikmawan, 2020), tapi bagaimana pengimpelemntasian dari bentuk symbol feminisme yang telah didapatkan oleh pemimpin perempuan dalam kekuasaan dan politik.

Kesimpulan

Penelitian ini menghasilkan gambaran betapa sulitnya kaum perempuan terutama pemimpin perempuan yang tidak dapat terlepas dalam lingkaran dinasti politik dan system patriarki yang dianalogikan seperti burung dalam sangkar emas, memiliki kekuasaan dan kewenangan namun tetap hanya menjadi pion yang diatur - atur oleh *Local Strongman*. Namun dari semua pemimpin perempuan di Banten, Airin menjadi salah satu pembeda dibanding dengan pemimpin perempuan lainnya. Sisi feminis nya yang ia bukti kan melalui sisi kebijakan yang ia terapkan dan bentuk dmokratis untuk masyarakat Kota Tangerang Selatan. Walaupun oligarki mengikat namun sisi feminism tidak menjadi penghalang dalam kebebasan perempuan dalam menjalankan pemerintah yang mensejahterakan masyarakatnya dan menjadi pendorong perubahan dalam meninggalkan system pemerintahan yang bobrok dan menjadi pemerintahan yang baik yakni melayani masyarakat sebaik - baiknya.

Refrensi

- Creswell. (2009). *Research design: qualitative, quantitative and mixed approaches*. Research Design. <https://doi.org/10.2307/1523157>
- Creswell, J. W. (2013). *John W. Creswell-Research Design_ Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches-SAGE Publications (2013).pdf*. SAGE Publication Inc.

- Hikmawan, M. D. (2017). Pluralisme Demokrasi Politik di Indonesia. *Journal of Governance*, 2(2), 223–247.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31506/jog.v2i2.2678>
- Hikmawan, M. D. (2020). *Consensual Democracy: A Challenge for Differentiated Citizenship. International Journal of Innovation, Creativity and Change. www.ijicc.net* (Vol. 11). Retrieved from www.ijicc.net
- Nur, Atika Kusumaningtyas. (2017). Perempuan Kepala Daerah Dalam Jejaring Oligarki Lokal. *E-journal Politik P2LIPI*, Vol.14(2)
- Yusuf, Mohammad Pambudi. PEREMPUAN DAN POLITIK Studi tentang Aksesibilitas Perempuan Menjadi Anggota Legislatif Di Kabupaten Sampang. Surabaya.
- Mukarom ,Zaenal. (2008). Perempuan dan Politik : Studi Komunikasi Politik tentang Keterwakilan Perempuan di Legislatif. *MediaTor* . Vol.9 (2)
- Pergerakan Indonesia dan Komite Persiapan Yayasan Indonesia Kita. (2006). Representasi Politik Perempuan: Sekadar Ada Pemberi Warna. *Jurnal Sosial Demokrasi*. Edisi 6 tahun 2.
- Marhaeni, Tri Pudji Astuti. (2008). CITRA PEREMPUAN DALAM POLITIK. *Jurnal Studi Gender dan Anak YINYANG. Pusat Studi Gender STAIN Purwokerto*. Vol.3 No.1.
- Nimrah , Siti dan Sakaria. (2015). Perempuan Dan Budaya Patriarki Dalam Politik (Studi Kasus Kegagalan Caleg Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2014). *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*. Vol. 1 No. 2.
- SN. (25oct,2016). Kepala Daerah Perempuan dan Politik Dinasti di Banten Retrieved from. <http://ip.fisip-untirta.ac.id/kepala-daerah-perempuan-dan-politik-dinasti-di-banten/>